



LAPORAN KINERJA

KPKNL TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
(1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2023)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA**

23 JANUARI 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, Visi – Misi, dan Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya...	2
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) KPKNL Tasikmalaya.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	16
B. Penetapan Kinerja.....	18
C. Addendum Kontrak Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
1. Perbandingan Target Awal Tahun Dan Realisasi Kinerja 2023.....	28
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan:	
a Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir.....	28
b Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kementerian Keuangan (2019 – 2024).....	31
c Target Pada Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2023.....	35
3. Upaya-Upaya <i>Extra Effort</i> Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....	36
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	40
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).....	45
7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja.....	47
8. Rencana Aksi Ke-Depan.....	48
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023.....	50
BAB IV PENUTUP	52
Lampiran	53
Prestasi KPKNL Tasikmalaya Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Tasikmalaya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. Sebagai Kantor yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022, KPKNL Tasikmalaya selalu berusaha menjaga integritasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta praktik penerimaan gratifikasi di semua jenis pelayanannya, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang serta melakukan pengamanan kekayaan negara dengan melakukan pengadministrasian dan penilaian aset negara. Dengan selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan maksimal, KPKNL Tasikmalaya terus berupaya untuk menjadi Kantor Pelayanan terbaik dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi, dan Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya

1. Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat dilihat melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyelarasan peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyelarasan organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Tasikmalaya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). KPKNL Tasikmalaya juga berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Tasikmalaya berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian

Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Tasikmalaya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

V I S I

“Menjadi pengelola kekayaan Negerayang professional dan akuntabel bertanggung untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

M I S I

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Tasikmalaya telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto “PASTI”, Profesional, Amanah, Santun, Transparan, Inovatif kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Tasikmalaya dapat semakin baik dan maju bersama menuju arah yang lebih baik dengan dilandasi 3ertical dalam diri, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya

KPKNL Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Tasikmalaya dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| i Kepala Kantor | : 1 (satu) pegawai |
| ii Subbagian Umum | : 8 (delapan) pegawai |
| iii Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 6 (enam) pegawai |
| iii Seksi Piutang Negara | : 5 (lima) pegawai |
| iv Seksi Hukum dan Informasi | : 4 (empat) pegawai |
| v Seksi Kepatuhan Internal | : 2 (dua) pegawai |
| vi Jabatan Fungsional Pelelang | : 3 (tiga) pegawai |
| vii Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah | : 2 (dua) pegawai |

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) KPKNL Tasikmalaya

Sudah barang tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (proses bisnis) dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, permasalahan utama (*strategic issues*) dihadapi KPKNL Tasikmalaya, antara lain :

1. Permasalahan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

Meskipun selama ini KPKNL Tasikmalaya selalu berhasil mencapai target di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, namun demikian kenyataan di lapangan ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul, yaitu :

- a. Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal)
 - 1) Masih kurangnya kesadaran satker-satker dalam menyampaikan laporan wasdal kepada KPKNL.
 - 2) Tidak terdapat sanksi yang bagi satker-satker yang tidak menyampaikan laporan wasdal.
- b. Pengelolaan BMN.
 - 1) Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara parsial sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan;
 - 2) Masih terdapat syarat permohonan yang diajukan kurang lengkap, sehingga perlu dilakukan permintaan kelengkapan berkas yang membutuhkan waktu lama.
 - 3) Masih Kurangnya kesadaran sebagian satker di K/L dalam pengajuan permohonan pengelolaan BMN, sehingga untuk pengguna barang tertentu masih sangat sedikit pengajuannya.
 - 4) Khusus satker TNI, masih banyak BMN yang telah dilakukan pemanfaatan namun belum diajukan permohonannya kepada pengelola barang. Hal ini disebabkan karena panjangnya birokrasi serta adanya sistem komando di lingkungan TNI .
 - 5) Untuk Pemanfaatan Sewa Bahwa Target sudah hampir Sebanding Dengan Potensi yang ada di KPKNL Tasikmalaya,
 - 6) Penerimaan yang berasal dari Hibah tidak termasuk ke dalam capaian PNBPK PKN.

c. Aplikasi.

Permasalahan Aplikasi pada PKN lebih banyak terjadi pada penerapan aplikasi SIMAN V2 di antara permasalahan tersebut adalah :

- 1) Masih banyak menu dalam aplikasi SIMAN V2 yang belum sempurna, sehingga sampai saat ini belum dapat diterapkan dengan baik.
- 2) Peralihan Aplikasi SIMAN menuju penggunaan SIMAN V2 masih perlu upaya lebih keras agar KPKNL Tasikmalaya sebagai pengelola dapat menguasai dan memberikan sosialisasi yang baik kepada satuan kerja.
- 3) Penggunaan Aplikasi SIMAN dan SIMAN V2 memerlukan koneksi internet yang cepat dan dukungan server pusat yang baik agar dapat memudahkan satuan kerja dalam pengelolaan BMN pada SIMAN.

2. Permasalahan di Seksi Piutang Negara :

Priangan Timur sebagai wilayah kerja Pengurusan Piutang Negara KPKNL Tasikmalaya, dalam proses penyelesaian piutang negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, budaya, dan kesadaran masyarakatnya. Permasalahan di bidang pengurusan piutang negara ini sangat erat hubungannya dengan pencapaian target baik target

a. Penyelesaian BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) maupun target BIAD PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara).

BKPN yang sekarang ada dalam pengurusan KPKNL Tasikmalaya sebagian besar merupakan BKPN yang tidak lengkap, yaitu BKPN yang tidak didukung barang jaminan, barang jaminan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang lengkap, nilai barang jaminan yang tidak menutup nilai hutang, dan rendahnya kemampuan

ekonomi debitur untuk melunasi kewajibannya. Selain itu hutang yang diurus merupakan piutang negara non perbankan yang nominalnya sebagian besar relatif tidak besar. BKPN yang diperhitungkan adalah pada BKPN di bawah tahun 2018.

- b. Sulitnya Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara yang penyerahan s.d. tanggal 31 Desember tahun 2010. Hingga akhir tahun 2023 penyelesaian BKPN kategori I penyerahan s.d 31 Desember 2010 adalah 0 berkas. Berbeda dengan penyelesaian BKPN penyerahan di atas tahun 2010 yang memungkinkan dapat didominasi oleh BKPN serahan baru. Meski demikian, penyelesaian berkas pada rentang waktu tersebut masuk ke dalam normal perhitungan 1 kali atau setengah kali lebih rendah dari fisik berkas yang diselesaikan. Pada penyelesaian surat keterangan dari kelurahan maupun desa tidak dapat segera terbit setelah proses pengajuan. Atas BKPN yang masuk ke dalam kategori I telah dilakukan kegiatan konfirmasi atas jumlah jaminan harta bergerak, hal ini perlu dilakukan mengingat hampir seluruh barang jaminan tersebut telah berpindahtangan. Melaksanakan koordinasi dengan baik dengan pihak samsat maupun kepolisian guna mengidentifikasi kemungkinan adanya cacat hukum.
- c. Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan yang masuk ke dalam penyelesaian kategori II yakni atas seluruh BKPN penyerahan 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2023, dan/atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi Piutang Negara telah melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang. Hal ini guna meminta pertanggung jawaban Penyerah Piutang atas upaya mereka dalam melaksanakan penyelesaian BKPN yang diserahkan kepada PUPN. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penyerah piutang dengan KPKNL Tasikmalaya karena masing-masing pihak memiliki target terkait penyelesaian piutang.

3. Permasalahan di Seksi Pelayanan Penilaian :

Pada bidang penilaian sebetulnya tidak ditemukan masalah atau kendala yang berarti, dan selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada pelayanan penilaian sebagai berikut:

- a. Permohonan Penilaian diajukan dalam periode tertentu
Satuan kerja pemohon penilaian pada periode awal tahun belum banyak memperhatikan BMN, BMD, maupun barang rampasan yang sudah seharusnya dihapuskan dengan dinilai terlebih dahulu. Banyak yang merapel dan mengumpulkannya saat sudah memenuhi tempat penyimpanan maupun adanya perhatian maupun arahan dari pimpinan di atasnya.
- b. Permohonan Objek Penilaian kurang tertata dengan baik
Satuan kerja pemohon penilaian mengajukan penilaian secara sekaligus dengan berbagai macam jenis objek, kondisi, dan lokasi sehingga menyulitkan tim penilai dalam merencanakan penilaian dengan baik.
- c. Terbatasnya sumber daya Tim Penilai
Pejabat Fungsional KPKNL Tasikmalaya hanya tersedia 2 (dua) masing masing 1 (satu) Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Pertama. Dalam praktik tugas penilaian

JFPP mengikutsertakan pegawai di unit lain ketika memiliki jadwal yang cocok. Dalam survei objek penilaian dibutuhkan peralatan pendukung, namun jumlah dan kondisinya kurang memadai. Pelayanan penilaian mendapatkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan penilaian dengan tindak lanjut survei lapangan dengan peninjauan langsung meliputi Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah dengan perkiraan frekuensi jumlah barang yang dinilai sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) barang. Apabila didistribusikan secara merata kepada 2 (dua) orang tenaga penilai di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya, maka jumlah frekuensi barang yang harus dinilai per 1 (satu) orang yaitu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) barang. Sejauh ini permasalahan ini masih dapat diatasi oleh Penilai dengan melakukan penilaian secara individu dengan tujuan agar frekuensi penilaian yang dapat ditangani lebih banyak.

d. Keterbatasan data pasar

Saat tim melakukan survei di lapangan tim sulit mendapatkan data transaksi karena minimnya database. Mencari data pada masyarakat sekitar objek pun cukup sulit dilakukan di lokasi tertentu karena belum terbuka terhadap transaksi tanah.

e. IKU Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian

Adapun untuk IKU deviasi ketergantungan hasil penilaian terdapat nilai pengajuan dari satker lebih besar daripada nilai yang ditetapkan oleh Penilai sehingga deviasi nilai terjadi namun masih dalam batas yang ditentukan dalam IKU tersebut.

4. Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, antara lain:

a. Objek Lelang

Masalah pemasaran dan variatif objek lelang di Priangan Timur harus ditingkatkan agar dapat menarik calon pembeli lelang. Pelaksanaan lelang di tahun 2023 didominasi lelang eksekusi barang tidak bergerak yang sulit dicairkan (dijual kembali oleh pembeli) dalam waktu dekat. Informasi yang ditampilkan pada *website* lelang.go.id belum informatif misalnya: masih ditemukan belum adanya pencantuman nomor kontak penjual. Obyek lelang tanah sebagian besar masih dihuni oleh pemiliknya dan informasi lokasi dari penjual cukup sulit didapat oleh calon pembeli.

b. Harga Limit Objek Lelang

Harga Limit Lelang masih mengacu nilai pasar sehingga masih belum menarik calon pembeli sehingga TAP (Tanpa Ada Penawaran) pada lelang masih tinggi. Hal tersebut membuat target pokok tidak tercapai. Sebagai Risiko paling tinggi apabila dikaitkan dengan capaian target hasil lelang. Hal ini terutama terjadi pada lelang eksekusi hak tanggungan yang nilainya cukup besar. Meskipun pada target produktifitas lelang tercapai namun target pokok lelang dan penerimaan Bea Lelang tahun 2023 belum tercapai.

c. Aplikasi lelang.go.id

Aplikasi lelang.go.id belum dikenal secara luas oleh masyarakat di wilayah Priangan Timur wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya (Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran)

sehingga masyarakat belum familiar membeli barang secara online menggunakan website atau aplikasi Lelang Indonesia. Dalam hal lelang via internet (*open dan closed bidding*) kendala muncul dari masyarakat pengguna jasa lelang yang mengalami kesulitan dalam registrasi dan tata cara mengikutinya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap teknologi informasi/internet. Untuk lelang eksekusi yang berpotensi timbul gugatan lebih aman menggunakan lelang konvensional, karena penyampaian informasi kepada peserta lelang secara langsung dan menyeluruh.

d. Pembatalan Lelang Oleh Pihak Penjual

Terdapat pembatalan lelang oleh pihak penjual ketika permohonan lelang sudah tampil di lelang.go.id. Hal tersebut merugikan Pelelang KPKNL Tasikmalaya maupun calon pembeli karena sudah disetornya uang jaminan penawaran lelang.

e. Wanprestasi Pembeli Lelang pada lelang Perum Perhutani untuk lelang non eksekusi sukarela kayu

Untuk wanprestasi pada pelaksanaan lelang kayu merupakan wanprestasi parsial dan tanpa uang jaminan sehingga upaya yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan koordinasi dengan para asman Perum Perhutani dan bendahara penerimaan.

5. Permasalahan di Seksi Hukum dan Informasi :

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

a. Dalam hal Tugas Fungsi Bendahara Penerimaan

- 1) Pengembalian uang jaminan peserta lelang, Bendahara Penerimaan masih sering menemukan peserta lelang yang mencantumkan nomor rekening atau nama bank yang salah, juga tidak mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi, sehingga menghambat bendahara penerimaan dalam upaya pengembalian uang jaminan lelang;
- 2) Selain itu terdapat peserta lelang yang menggunakan rekening bank daerah maupun nasional yang telah dilikuidasi dan berganti nama sehingga Bendahara Penerimaan memerlukan waktu lebih untuk konfirmasi kepada peserta lelang dan pihak bank agar tidak salah dalam mengembalikan uang jaminan lelang.
- 3) Untuk jangka waktu pengembalian uang jaminan lelang SOP satu hari, beberapa peserta lelang menganggap bahwa pengembalian itu di hari yang sama dengan hari pelaksanaan lelang. selain itu bagi peserta lelang yang berbeda bank persepsi untuk pengembalian uang jaminan lelang akan terproses lebih lama dibanding dengan yang bank persepsi nya sama dengan bank persepsi yang digunakan oleh KPKNL namun peserta lelang kadang masih menganggap Bendahara Penerima menghambat proses pengembalian uang jaminan tersebut.

b. Dalam penanganan perkara lelang

- 1) Sering ditemui gugatan lelang yang terjadi sebelum lelang bahkan sebelum ada permohonan lelang. Selain itu adapula gugatan perkara yang ditujukan/diterima KPKNL Tasikmalaya, namun Anggaran DIPA Penanganan Perkara dan Sumber Daya Manusia terbatas.

- 2) Pada aplikasi Aplikasi Focus PN
Produk Hukum, tidak bisa dicetak langsung dari aplikasi. Belum terkoneksi dengan aplikasi pelang, sehingga sering salah dalam input NTPN. Terkendala masalah input data pada aplikasi dimana Seksi Hukum & Informasi harus menunggu Seksi Piutang Negara melakukan input data terlebih dahulu.
 - 3) Pada Aplikasi Sibankum, Jenis/nama pemohon lelang terbatas (belum semua terdaftar).
- c. Dalam Kehumasan dan Publikasi
Belum optimalnya peran seluruh pegawai dalam mendukung kegiatan publikasi dan kehumasan. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme pegawai dalam Gerakan *Employee Advocacy*, merespon setiap publikasi berita kegiatan maupun kontribusi atas isi konten berita/artikel di portal maupun sosial media milik kantor terkait tugas dan fungsi masing-masing.
6. Permasalahan di Seksi Kepatuhan Internal :
Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal secara umum ialah adanya peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal yang sering mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN, sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.
 7. Permasalahan di Subbagian Umum
Permasalahan yang kerap terjadi pada Sub Bagian Umum, sebagai berikut:
Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab pada Subbagian Umum yaitu IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Secara umum, capaian kinerja Subbagian Umum dapat dikatakan Baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya IKU yang tidak tercapai targetnya, baik merujuk pada capaian pengembangan kompetensi pegawai maupun dari capaian persentase kualitas anggaran. Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat kendala.
Pada IKU Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU tidak optimal, antara lain:
 - a. Dalam hal Pengembangan Kompetensi Pegawai:
Seluruh pegawai telah memberikan perhatian dan mengikuti berbagai jenis program pengembangam kompetensi, namun tidak semua Program menyediakan jam pelatihan yang cukup untuk langsung memenuhi minimal jam pelatihan pegawai. Akan tetapi dalam jangka waktu 1 tahun, seluruh pegawai mencapai paling sedikit 30 JP dan sesuai kriteria sebagaimana yang direncanakan. Informasi pelatihan diklat yang terdapat di aplikasi SEMANTIK hanya dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan sehingga Subbagian Umum membuat link aplikasi internal monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi yang dapat diisi secara mandiri. Namun pegawai belum sadar untuk mengisi secara optimal setelah mengikuti diklat.
 - b. Dalam hal Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Adanya perubahan reformulasi IKU IKKPA (Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Adapula kontradiksi perhitungan dalam komponen yang membentuk nilai

IKU IKKPA berupa nilai penyerapan anggaran dalam IKPA dan Nilai Efisiensi dalam SMART DJA.

- 1) Tidak tercapainya efisiensi Penggunaan Anggaran; dan
- 2) Capaian Keluaran Kegiatan (Capaian Output).

Selain itu BMN Subbagian Umum KPKNL Tasikmalaya dalam hal Pengelolaan BMN sebagai pengguna barang tak luput dari permasalahan seperti:

- a. Perpindahan BMN dari beberapa ruangan tidak dilaporkan terlebih dahulu oleh pegawai
- b. Adanya peraturan yang tidak mengizinkan munculnya biaya pemeliharaan atas tanah untuk rumah negara.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2021 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun ringkasan/ikhtisar capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 KPKNL Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
Stakeholder Perspective(30%)								32,84%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan negara dan lelang Terhadap Perekonomian							109,46%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	111,00%	14%	30%	111,00%	111,00%	hijau
1b-CP	Persentase Produktifitas lelang	P/M	80,00%	160,78%	14%	30%	200,98%	120,00%	hijau
1c-CP	Indeks Integritas	P/L	88,67	89,17	19%	40%	88,67	100,56%	hijau
Customer Perspective (20%)								20,79%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							103,95%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	89,87%%	14%	50%	89,87%	89,87%	kuning

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100,00%	118,03%	14%	50%	118,03%	118,03%	hijau
Internal Process Perspective (25%)								25%	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							114,54%	
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/M	68,00%	76,49%	14%	30%	112,49%	112,49%	hijau
3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100,00%	134,59%	19%	40%	134,59%	120,00%	hijau
3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100,00%	109,92%	14%	30%	109,92%	109,92%	hijau
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							113,56%	
4a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	94,00%	100,00%	14%	36%	106,38%	106,38%	hijau
4b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	P/M	86,00%	104,96%	14%	36%	122,05%	120,00%	Hijau
4c-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100,00%	114,29%	11%	28%	114,29%	114,29%	hijau

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	25,00%	3,00%	14%	50%	118,00%	120,00%	hijau
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	P/M	70	85,40	14%	50%	122,00%	120,00%	hijau
6	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							111,53%	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	P/M	86,00%	95,92%	14%	100%	111,53%	111,53%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)								25%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							120,00%	
7a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	P/M	100,00%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							116,19%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100,00%	108,58%	14%	33%	108,58%	108,58%	hijau
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,00%	183,33%	14%	33%	183,33%	120,00%	hijau
8c-CP	Deviasi Data PNBPNBP Fungsional DJKN	P/M	15,00%	0,00%	14%	33%	200,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	80	96,00	14%	100%	120,01%	120,00%	hijau
10	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							120,00%	
10a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	P/M	60	96,54	14%	100%	160,90%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								112,12%	hijau

A. Rencana Strategis

1. Misi

Misi KPKNL Tasikmalaya adalah :

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- c. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- d. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- e. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

2. Tujuan

KPKNL Tasikmalaya mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Tasikmalaya adalah :

- a. Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- c. Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- d. Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- e. Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Tasikmalaya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- c. Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- d. Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- e. Menerapkan sistem aplikasi dibidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.

- f. Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Tasikmalaya tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Tasikmalaya meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Tasikmalaya:

a. Pelayanan Lelang

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- 2) Memberikan konsultasi kepada stakeholder tentang peraturan, syarat dan
- 3) prosedur lelang;
- 4) Melaksanakan lelang online secara optimal;
- 5) Mempercepat proses penyelesaian Risalah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- 6) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- 7) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

b. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

- 1) Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;
- 2) Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;
- 3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang;
- 4) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

c. Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
- 2) Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
- 3) Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
- 4) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

d. Pelayanan Penilaian

- 1) Mempercepat proses permohonan penilaian baik penilaian BMN maupun
- 2) penilaian barang jaminan hutang dengan tepat waktu dan berkualitas;
- 3) Menyelesaikan penilaian kembali (revaluasi).
- 4) Menyusun database penilaian guna mendukung informasi penilaian yang dapat
- 5) digunakan dalam berbagai keperluan;
- 6) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

- e. Pelayanan Hukum dan Informasi
 - 1) Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah
 - 2) hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
 - 3) Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
 - 4) Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
 - 5) Menerapkan aplikasi Sibankum;
 - 6) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

- f. Pelayanan Subbag Umum
 - 1) Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Tasikmalaya dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
 - 2) Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompentensi tinggi;
 - 3) Mengelola anggaran dengan optimal;
 - 4) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

B. Penetapan Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya merupakan misi KPKNL Tasikmalaya. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL Tasikmalaya. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Utama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu :

- a. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
- b. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
- d. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif;
- e. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- f. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
- g. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;
- h. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal;
- i. Organisasi yang *Fit For Purpose*;
- j. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif;
- k. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif;

Adapun peta strategi Tambahan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yaitu Organisasi yang *Fit For Purpose* dengan IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Tasikmalaya :

- a. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
- b. Persentase produktivitas lelang
- c. Persentase Realisasi Pokok Lelang
- d. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
- e. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan
- f. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan
- g. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
- i. Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction
- j. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online
- k. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
- l. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
- m. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
- n. Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
- o. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
- p. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- q. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
- r. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
- s. Indeks Integritas
- t. Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

Formulir Pengukuran Kinerja
Unit Organisasi Eselon I – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tahun Anggaran 2023
KPKNL Tasikmalaya

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	68%	68%	68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif							
4a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
4b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	70	70	70	70	70	70	70
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	-	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100 %
9	Organisasi yang Fit For Purpose							
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
10a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp2.174.612.000,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : **Rp1.981.966.458,-**

C. Adendum Kontrak Kinerja

1. Tidak ada adendum pada Target PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dan Pokok Lelang Tahun 2023 dengan nilai
 - a. PNBPN BMN: Rp. 2,550,000,000,00
 - b. PNBPN Lelang: 2.891.000.000,00
 - c. PNBPN Piutang Negara: Rp. 10.050.000,00
 - d. Total PNBPN: Rp 5.451.050.000,00
2. Adendum pada Target Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2023
 - a. Penurunan Outstanding Piutang Negara: Rp. 1,300,000,000,00
Dari total target Penurunan Outstanding Piutang Negara tersebut diatas sudah tercapai di semester 1 tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.086.653.572,00. Karena target Penurunan Outstanding Piutang Negara telah mencapai 83,59% dari target tahunan atau melebihi target Semester I dengan capaian diatas 120% atau 278,63% dari target semester I tahun 2023. Maka dilakukan addendum kontrak kinerja terkait Target Penurunan Outstanding Piutang Negara pada Triwulan III Tahun 2023.
 - b. Penurunan Outstanding Piutang Negara: Rp. 1,650,000,000,00
Dari total target Penurunan Outstanding Piutang Negara tersebut diatas sudah tercapai di Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.849.724.092,00. Karena target Penurunan Outstanding Piutang Negara telah mencapai 112,10% dari target tahunan atau melebihi target Triwulan III dengan capaian diatas 120% atau 186,84% dari target Triwulan III tahun 2023. Maka dilakukan addendum kontrak kinerja terkait Target Penurunan Outstanding Piutang Negara pada Triwulan IV Tahun 2023.
 - c. Penurunan Outstanding Piutang Negara: Rp. 2,300,000,000,00
Adapun untuk target Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) mengalami peningkatan target pada Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya dari 29 menjadi 32 pada Triwulan IV Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target Awal Tahun Dan Realisasi Kinerja 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 ini KPKNL Tasikmalaya bisa mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkan, kecuali untuk target Hasil Lelang dan Produktifitas Lelang, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,12%. Lebih jelasnya di bawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi di Tahun Anggaran 2023:

Tabel Capaian IKU Tahun 2023

K-Wide	Stakeholder Perspective(30%)								
	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	17,14%	32,28%	32,28%	63,53%	63,53%	111%	111%		
Capaian	120%	107,6%	107,6%	1,058%	105,8%	111%	111%		

K-Wide	Stakeholder Perspective(30%)								
	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1b-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	70,01%	89,20%	89,20%	115,62%	115,62%	150,22%	150,22%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Stakeholder Perspective(30%)								
	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1c-CP Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17		
Capaian	-	-	-	-	-	100,5%	100,56%		

K-Wide	Customer Perspective(20%)								
	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK	Kuning
Realisasi	11,86%	24,20%	24,20%	58,72%	58,72%	89,87%	89,87%		
Capaian	59,3%	60,5%	60,5%	97,8%	97,8%	89,87%	89,87%		

K-Wide	Customer Perspective(20%)								
	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK	Hijau
Realisasi	383,10%	278,63%	278,63%	186,84%	186,84%	118,03%	118,03%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	118,03%	118,03%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/TLK	Hijau
Realisasi	-	67,91%	67,91%	65,50%	65,50%	76,49%	76,49%		
Capaian	-	120%	120%	119%	119%	112,49%	112,49%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
	3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK	Hijau
Realisasi	-	29,56%	29,56%	68,24%	68,24%	134,59%	134,59%		
Capaian	-	73,9%	73,9%	113,7%	113,7%	120%	120%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								Pol/ KP	Ket
	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal									
	3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			
Target	10%	30%	33%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK	Hijau	
Realisasi	11,92%	24,83%	24,83%	64,33%	64,33%	109,92%	109,92%			
Capaian	119,2%	82,76%	82,76%	107,2%	107,2%	109,92%	109,92%			

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								Pol/ KP	Ket
	4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal									
	3d-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK	Hijau	
Realisasi	28,57%	54%	54%	89,52%	89,52%	114,29%	114,29%			
Capaian	120%	120%	120%	119,3%	119,3%	114,29%	114,29%			

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								Pol/ KP	Ket
	3. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif									
	4a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/ TLK	Hijau	
Realisasi	100%	102,7%	102,7%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%			
Capaian	106,38%	109,25%	109,25%	120%	120%	120%	120%			

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								Pol/ KP	Ket
	4. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif									
	4b-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Max/ TLK	Hijau	
Realisasi	75,94%	95,17%	95,17%	97,58%	97,58%	104,96%	104,96%			
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%			

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	4. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif								
	4c-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	28,57%	54%	54%	89,52%	89,52%	114,29%	114,29%		
Capaian	120%	120%	120%	119,36%	119,36%	111,53%	111,53%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	4,53%	0%	0%	3,66%	3,66%	3%	3%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5b-CP Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	83,67	83,89	83,89	84,07	84,07	85,4	85,4		
Capaian	119,53%	119,84%	119,84%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Internal Process Perspective (25%)								
	6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	50%	50%	-	-	86%	86%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	-	91,11%	91,11%	-	-	95,92%	95,92%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
	7a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	8. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal								
	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	100%	95,57%	95,57%	114,60%	114,60%	108,58%	108,58%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	8. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal								
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	100%	183,33%	183,33%	183,33%	183,33%	183,33%	183,33%		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	9. Organisasi yang Fit For Purpose								
	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	-	-	-	-	-	96	96		
Capaian	-	-	-	-	-	96	96		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	10. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif								
	10a-CP Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	-	-	-	-	60	60	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	-	-	-	-	-	96,54	96,54		
Capaian	-	-	-	-	-	120	120		

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan

a. Capaian Kinerja Kurun Waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir

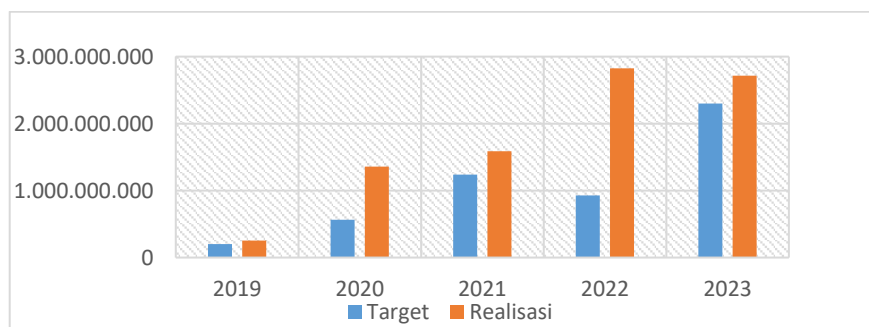
Berikut adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya :

UTILISASI

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2019	558.971.649.581	574.887.434.232	101,64%
2	2020	506.881.850.717	618.317.892.980	121,98%
3	2021	2.854.000.000	2.705.822.945	94,8%
4	2022	2.500.000.000	2.764.984.547	110,6%
5	2023	2.550.000.000	3.243.336.350	127,19%

PNDS

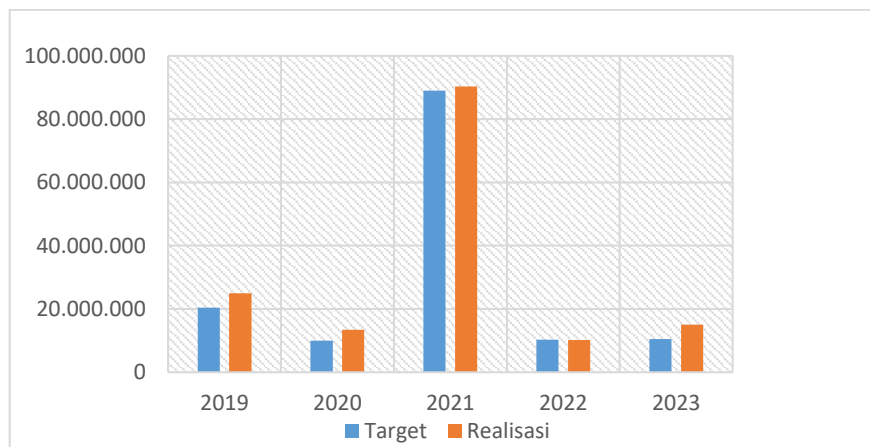
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	203.050.543	255.935.363	126,05%
2	2020	566.764.696	1.358.389.682	239,67%
3	2021	1.238.777.221	1.584.959.935	127,95%
4	2022	929.082.916	2.825.823.476	304,15%
5	2023	2.300.000.000	2 714 737 608	118,03%



**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
PNDS Tahun 2019-2023**

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

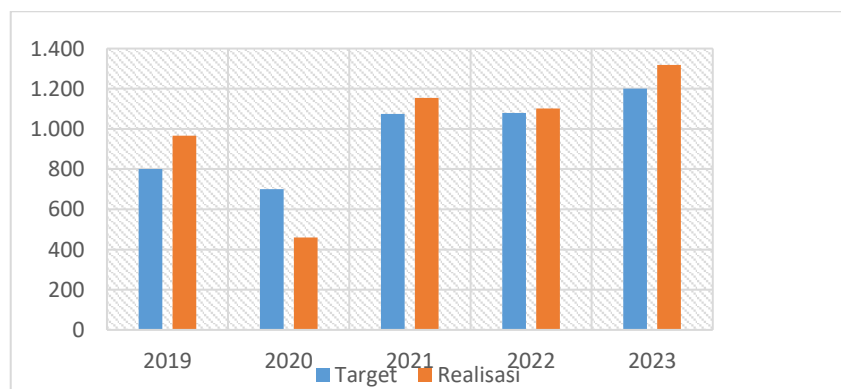
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	20.394.073	25.002.686	122,60%
2	2020	10.000.000	13.402.508	134,03%
3	2021	89.000.000	90.367.154	101,54%
4	2022	10.025.000	10.179.455,80	101,95%
5	2023	10.050.000	15.075.402	150,00%



**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
PND Tahun 2019-2023**

BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

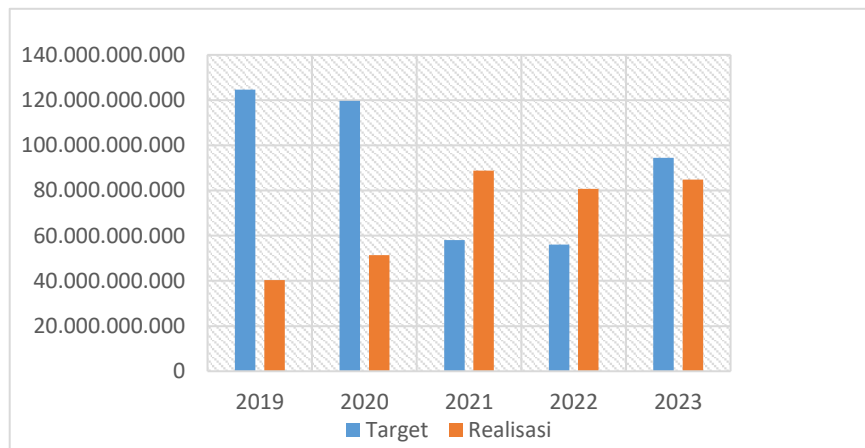
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	800	966	120,75%
2	2020	700	460	42,64%
3	2021	1.075	1.155	107,44%
4	2022	1.080	1.102	102,04%
5	2023	1.200	1.319	109,92%



**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
BKPN Tahun 2019-2023**

POKOK LELANG

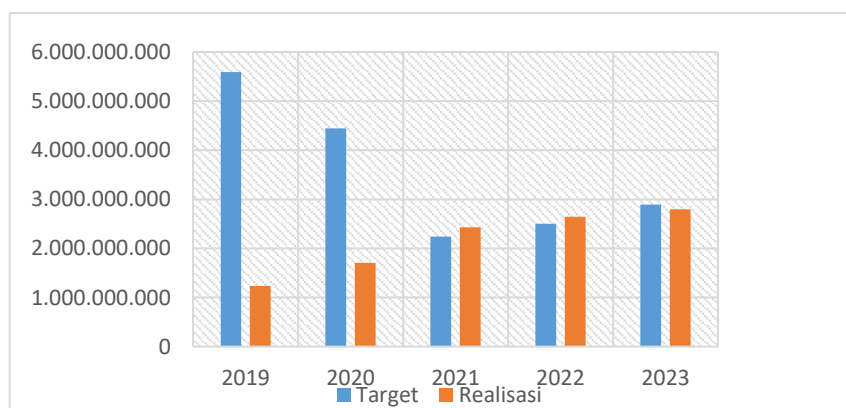
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	124.607.000.000	40.295.273.819	32,34%
2	2020	119.612.000.000	51.324.847.247	42,91%
3	2021	58.000.000.000	88.851.241.809	153,19%
4	2022	56.100.000.000	80.723.133.330	143,89%
5	2023	94.455.000.000	84.884.680.636	89,87%



**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
Pokok Lelang Tahun 2018-2023**

BEA LELANG

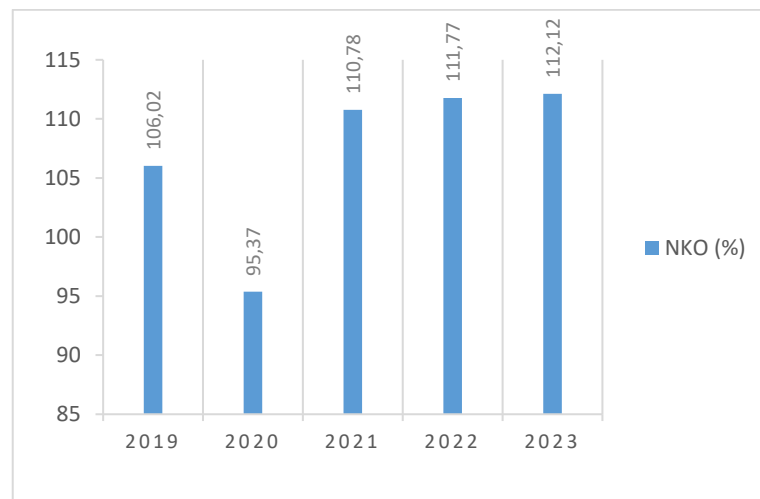
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2019	5.588.953.888	1.237.378.375	22,14%
2	2020	4.445.000.000	1.703.678.398	38,33%
3	2021	2.239.000.000	2.427.123.439	108,40%
4	2022	2.500.000.000	2.646.298.671	105,85%
5	2023	2.891.000.000	2.792.066.204	96,58%



**Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Bea Lelang
Tahun 2019-2023**

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

NO	TAHUN	NKO
1	2019	106,02%
2	2020	95,37%
3	2021	110,76%
4	2022	111,77%
5	2023	112,12%

**Grafik Capaian NKO Tahun 2019-2023**

b. Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kemenkeu

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum Kementerian Keuangan yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra Kementerian Keuangan periode sebelumnya (2015- 2019).

Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 7 (tujuh) tujuan yaitu

- 1) Terjaganya kesinambungan,
- 2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai,
- 3) Pembangunan System Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara,
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah,
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran,
- 6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dan
- 7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Sumber: <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan/rencana-strategis-kemenkeu>

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) maka dapat disampaikan table perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target dalam RPJM (2020-2024)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara			
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	112,49%	57%
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	111%	100%
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	120%	Tidak ada target dalam RPJM
	Indeks Integritas	100,56%	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	134,59%	100%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	114,29%	Tidak ada target dalam RPJM

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target dalam RPJM (2020-2024)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara			
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120%	29%
	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	109,92%	100%
	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Peningkatan Pelayanan Lelang			
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	89,87%	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase produktivitas lelang	120%	34%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	106,38%	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	122,05%	Tidak ada target dalam RPJM
Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan			
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	111,53%	75%

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target dalam RPJM (2020-2024)
Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	120%	Tidak ada target dalam RPJM
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Organisasi yang fit for purpose	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	108,58%	95%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	183,33%	Tidak ada target dalam RPJM

c. Target Pada Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2023

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
2. VISI : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
3. MISI : 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.339.913.146,0
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.960.303,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	526.556.943,0
07	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	80.994.450,0
	Total	4.951.424.842,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
11	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif		196.612.850,0
11.01	Rasio Defisit terhadap PDB	(2,35%)-(2,72%)	
11.02	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	
21	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal		2.947.656.457,0
21.01	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,38%-9,09%	
21.02	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	
21.03	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	65%	
31	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat		26.698.257,0
31.01	Indeks kualitas belanja pemerintah	83	
31.02	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,235	
31.03	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	31,94%	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
41	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel		81.355.071,0
41.01	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,15	
41.02	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	
41.03	Nilai kinerja anggaran K/L	82,2	
41.04	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	94%	
42	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial		182.247.871,0
42.01	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Blaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65%	
42.02	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	
43	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali		17.913.064,0
43.01	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	
43.02	Rasio Utang terhadap PDB	36,45% - 37,36%	
43.03	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	
51	Organisasi dan SDM yang optimal		31.028.696.198,0
51.01	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,15	
51.02	Persentase penyelesaian delayering	-	
51.03	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,8%	
51.04	Tingkat implementasi learning organization	82%	
51.05	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85%	
51.06	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	
51.07	Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	92%	
52	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi		2.267.665.296,0
52.01	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	
52.02	Persentase penyelesaian project strategis TIK	92%	
53	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah		63.581.140,0
53.01	Indeks integritas	91,5	
53.02	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4	
54	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal		8.429.483.803,0
54.01	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	
54.02	Dwelling time	3,3 hari - 2,9 hari	
	Total		45.241.910.007,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
015.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	24.729.437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.968.820,0	0,0	0,0	0,0	26.698.257,0	26.900.324,0	27.335.877,0	25.279.116,0
015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.947.656.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.947.656.457,0	2.975.757.087,0	2.979.043.026,0	2.847.109.566,0
015.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	232.788.341,0	13.200.240,0	35.527.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281.516.006,0	201.466.374,0	203.350.662,0	205.423.278,0
015.CE	Program Kebijakan Fiskal	196.612.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196.612.850,0	190.971.649,0	191.138.673,0	178.334.332,0
015.WA	Program Dukungan Manajemen	32.921.413.013,0	150.000,0	8.864.543.104,0	0,0	0,0	0,0	3.320.320,0	0,0	0,0	0,0	41.789.426.437,0	42.109.576.814,8	41.181.971.663,8	40.374.398.471,0
	Total	36.323.200.098,0	13.350.240,0	8.900.070.529,0	0,0	0,0	0,0	5.289.140,0	0,0	0,0	0,0	45.241.910.007,0	45.504.672.248,8	44.582.839.901,8	43.630.544.763,0

Jakarta, 13 Februari 2023

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisis-keuangan/rencana-strategis-kemenkeu>

3. Upaya-Upaya *Extra Effort* Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Upaya Extra Effort yang Dilakuka
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	
1c-CP	Indeks Integritas	Sosialisasi webinar anti korupsi oleh kepala kantor dan publikasi pada media sosial
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Melaksanakan program Keringanan Utang 2023 dan Penyampaian surat paksa
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data BM
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan terkait, guna update informasi terkait kendala maupun progress sertifikasi

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Melaksanakan program Keringanan Utang 2023 dan Penyampaian surat paksa
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan penggalian data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	
4a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	Memberikan edukasi kepada pemohon lelang tentang sisi positif lelang e-auction
4b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	Memberikan edukasi kepada pemohon lelang tentang sisi positif lelang e-auction
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Analisis atas permohonan dan kegunaan hasil penilaian yang dilakukan dengan baik
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Terdapat 7(tujuh) permohonan perbantuan tenaga penilaian objek penilaian berada di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya, sehingga tim penilai harus mengatur ulang penjadwalan antrian survei penilaian, koordinasi dengan penilai yang dituju, antisipasi SOP hari penilaian.
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Komunikasi secara berkala dengan satuan kerja sebagai pengingat untuk segera menindaklanjuti Adanya update dan sosialisasi Aplikasi Rehana Seksi PKN
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyampaikan reminder secara rutin agar pegawai mengajukan usulan pelatihan setiap bulan
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Prognosa Anggaran - Menyusun Simulasi Perhitungan IKU IKPA dan SMART DJA - Melakukan optimalisasi anggaran dan penyesuaian RPD - Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran - Menyediakan alat bantu monitoring pelaksanaan anggaran yang up to date bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan para pemegang peran manajerial

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Memastikan semua aset telah ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Berkoordinasi dengan PPK, Pejabat Pengadaan dan Staf PPK dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kantor Pusat
9	Organisasi yang Fit For Purpose	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Sosialisasi Kinerja dan Manajemen Risiko kepada Internal KPKNL Tasikmalaya
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	
10a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	Sosialisasi RPT dan Monev Penguatan dan Pengawasan LHPPU tiap bulan

a. Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara

Seksi PKN KPKNL Tasikmalaya tidaklah bekerja sendiri, selalu berupaya dalam kolaborasi dan sinergi antar unit internal maupun eksternal dalam mengupayakan pencapaian target kinerja. Dalam pelayanan internal Seksi PKN berkolaborasi dengan seluruh unit pendukung maupun unit teknis dalam upaya pemenuhan target kinerja baik dari segi perolehan nilai target maupun tenggat waktu yang ditetapkan. Tak lupa pihak eksternal lain pendukung pun terlibat dalam upaya pemenuhan target kinerja seperti ATR/BPN kantor area Priangan Timur, Kanwil DJKN Jawa Barat, Seluruh Satuan Kerja Seksi PKN, dan Kemenkeu Satu Priangan Timur. Dalam perekaman, pelaporan, pemantauan Pengelolaan BMN dan kinerja pun Seksi PKN memiliki aplikasi Rebana Reksa Bandha Nagara (Menjaga Aset Negara) KPKNL Tasikmalaya. Dengan adanya aplikasi tersebut hasil kinerja dan pengambilan keputusan pun dapat dilakukan dengan baik dan mudah berdasarkan data yang ada. Selain itu Seksi PKN juga mengupayakan pendekatan yang baik kepada satuan kerja agar dapat dengan sadar dan saling mendukung antar unit agar pengelolaan BMN dapat lebih optimal dengan sosialisasi langsung/luring maupun daring dengan operator pengelolaan BMN satuan kerja. Adapun Seksi PKN memberikan apresiasi kepada satuan kerja berkinerja baik dalam pengelolaan BMN seperti peraih PNPB tertinggi maupun kepatuhan Wasdal dan pengelolaan BMN yang baik kepada satuan kerja terpilih.

b. Pelayanan Piutang Negara

Seksi PN KPKNL Tasikmalaya berupaya dalam menyelesaikan urusan piutang negara dengan terus meningkatkan kerjasama antara KPKNL Tasikmalaya dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengecekan status/pencarian data Perusahaan, Penyerah

Piutang untuk permohonan bantuan pemeriksaan. Selain itu dilakukan penggalian potensi piutang yang dapat diserahkan ke KPKNL sehingga terbukanya petensi menyelesaikan BKPN baik dengan pelunasan maupun PSBDT.

c. Pelayanan Penilaian

Penilaian melakukan upaya extra effort khususnya pada IKU Indeks Pembentukan Basis Data Properti dengan cara memperbanyak jumlah sumber data yang disurvei sebanyak 83 (delapan puluh tiga) data yang dilakukan pada kurun waktu triwulan ke-4 (empat) dikarenakan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) data. Hasilnya secara kumulatif diperoleh pada triwulan keempat sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) data sehingga capaian index diperoleh adalah maksimum sebanyak 120 (seratus dua puluh).

d. Pelayanan Lelang

Lelang yang dilaksanakan pada KPKNL Tasikmalaya yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pelelang dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, mulai dari penggalian potensi lelang seperti Hak Tanggungan yang memiliki peluang laku maupun sudah teridentifikasi informasi peminat objek lelang kepada pemohon lelang. Adapula mengadakan sosialisasi langsung kepada satuan kerja secara langsung tatap muka maupun daring. Khusus pada lelang non eksekusi sukarela untuk lelang UMKM, Pelelang berkolaborasi dengan unit pendukung untuk mengikuti acara pameran pada acara PKPT Puspa Kriya dalam rangka HUT Kota Tasikmalaya dan juga NGOPI UMKM (Ngobrol Perihal UMKM) berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Priangan Timur dan Pelaku UMKM agar lebih banyak lagi pelaku UMKM dan calon pembeli lelang UMKM tertarik pada lelang UMKM di KPKNL Tasikmalaya. Meskipun pada target produktifitas lelang tercapai namun target pokok lelang dan penerimaan Bea Lelang tahun 2023 belum tercapai.

e. Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi dalam tugas sebagai bendahara penerimaan saat terkendala pengembalian uang jaminan karena peserta lelang tidak mencantumkan identitas diri dengan baik, bendahara memiliki database peserta lelang serta berkoordinasi dengan pelelang dan juga petugas APT apabila telah memiliki nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Adapun untuk Penanganan Perkara Seksi Hukum dan Informasi tetap melaksanakan tugasnya jika memang kondisi DIPA sudah tidak tersedia serta selektif menghadiri sidang perkara yang dapat dilakukan secara daring maupun luring agar dapat efektif dan efisien dalam peksanaan tugas dan fungsi seksi hokum dan informasi. Pada bagian humas dan publikasi terus mengupayakan informasi terkait pelaksanaan tugas fungsi KPKNL Tasikmalaya kepada masyarakat luas melalui media sosial dan media cetak brosur pada acara sosialisasi langsung.

f. Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal terus berupaya dalam mewujudkan target manajemen kinerja KPKNL Tasikmalaya dan seluruh unit teknis maupun pendukung agar tercapai. Hal ini diupayakan dengan cara rutin bersinergi dan sosialisasi terkait timeline perencanaan kerja secara rutin kepada seluruh pegawai dalam berbagai macam kegiatan seperti Galang Semangat Pagi setiap senin-kamis pagi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan seluruh pegawai akan sadar dan dapat melaksanakan tugas manajemen kinerja sebagaimana mestinya.

g. Subbagian Umum

Dalam mewujudkan kinerja dan pelayanan yang baik Subbagian Umum dengan dukungan pegawai berusaha optimal dalam melayani unit Internal di KPKNL Tasikmalaya maupun eksternal. Dalam hal pengembangan kompetensi, memberi pengetahuan pada para Pegawai tentang berbagai program pengembangan kompetensi dan *tools* monitoringnya. Selain itu juga mendorong kesadaran diri pegawai untuk mengembangkan kompetensi dengan mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk salah satunya melalui e-learning melalui KLC. Selanjutnya mMemberuskan informasi pelaksanaan program pengembangan kompetensi melalui media komunikasi yang tersedia. Adapula menginventarisir keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara manual. Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dalam efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan KPKNL Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari strategi maupun langkah-langkah yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi. Berikut analisis keberhasilan maupun alternatif solusi yang telah dilakukan KPKNL Tasikmalaya:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kerja Tahun 2023	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Daya beli masyarakat yang mulai meningkat dan koordinasi yang baik antara KPKNL dengan stakeholder	-
1b-CP	Persentase produktivitas lelang		-
1c-CP	Indeks Integritas	Sosialisasi webinar anti korupsi oleh kepala kantor dan publikasi pada media sosial	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kerja Tahun 2023	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Realisasi permohonan dan nilai limit lelang Hak Tanggungan rata-rata sangat tinggi, namun tidak dibarengi dengan tingginya tingkat laku lelang, Cukup banyak lelang TAP, Adapula Lelang Batal saat Objek Lelang telah di setor UJL oleh calon pembeli, dan potensi nilai objek lelang di Priangan Timur belum membuat calon pembeli lelang berani memberikan harga tinggi sehingga target pokok lelang tidak tercapai	Koordinasi, Sosialisasi, dan Penggalan Potensi lelang agar dapat meminimisir lelang TAP, Pembatalan Lelang, dan Peningkatan publikasi objek lelang kepada calon pembeli melalui media sosial
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang, penyampaian Surat Paksa dan menerbitkan PSBDT	Koordinasi dengan Penyerah Piutang, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal		
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL, Satuan Kerja, dan Kanwil DJKN Jawa Barat, serta pihak lain yang terkait	Melakukan bimtek dan pengukuran langsung terhadap objek pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tasikmalaya, Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait	Melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait, untuk proses percepatan sertifikasi.
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang, penyampaian Surat Paksa dan menerbitkan PSBDT	Koordinasi dengan Penyerah Piutang, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kerja Tahun 2023	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terlibat	Koordinasi dengan Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif		
4a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	Pemohon lelang memahami dampak positif lelang e-auction	Sosialisasi berkala kepada para stakeholder pemohon lelang
4b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online		
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Analisis atas permohonan dan kegunaan hasil penilaian yang dilakukan dengan baik	Melakukan identifikasi kewenangan atas objek yang dimohonkan
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	program/kegiatan pembuatan basis data penilaian property yang dapat digunakan sebagai rujukan pembanding utamanya yaitu penilaian yang mempergunakan data pasar dalam perhitungannya.	-
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan satuan kerja	Mendorong satuan kerja untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan yang telah terbit
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif		
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Banyak pelaksanaan diklat yang bisa diselesaikan oleh pegawai	
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal		
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	-

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kerja Tahun 2023	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	Melakukan pemutakhiran data paket pengadaan pada aplikasi SiRUP secara berkala segera setelah revisi anggaran disahkan
9	Organisasi yang Fit For Purpose		
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	-
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif		
10a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	-

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Efisiensi terdiri atas efisiensi output program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO antara lain capaian output program, capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir, dan realisasi anggaran. Data efisiensi pada KPKNL Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Kode RO	Nomenklatur RO	Anggaran		Rincian Output		CRO	Nilai Maksimal CRO	Efisiensi (CROxPagu - Realisasi)
			Pagu Akhir	Realisasi SP2D	Target	Realisasi			
1	AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3.140.000	2.940.000	60	110	1,83	1,20	828.000
2	AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4.407.000	1.470.000	80	108	1,35	1,20	3.818.400

No	Kode RO	Nomenklatur RO	Anggaran		Rincian Output		CRO	Nilai Maksimal CRO	Efisiensi (CROxPagu) - Realisasi)
			Pagu Akhir	Realisasi SP2D	Target	Realisasi			
3	AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	31.888.000	27.869.302	50	65	1,30	1,20	10.396.298
4	AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	33.056.000	28.158.500	500	1319	2,64	1,20	11.508.700
5	AAH.003	Risalah Lelang	17.200.000	17.100.000	700	1071	1,53	1,20	3.540.000
6	AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40.000.000	33.707.000	20	25	1,25	1,20	14.293.000
7	FAE.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	15.726.000	12.122.000	29	41	1,41	1,20	6.749.200
8	FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	30.132.000	27.923.000	222	613	2,76	1,20	8.235.400
9	FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1.032.000	680.000	1	11	11,00	1,20	558.400
10	FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	11.424.000	5.685.000	1	3	3,00	1,20	8.023.800
11	FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	60.000.000	51.236.800	1	6	6,00	1,20	20.763.200
12	FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	31.356.000	24.784.000	318	410	1,29	1,20	12.843.200
13	FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	63.442.000	53.600.560	11	14	1,27	1,20	22.529.840
14	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	10.888.000	9.316.500	4	7	1,75	1,20	3.749.100
15	CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.600.000	10.400.000	2	2	1,00	1,00	200.000
16	EBA.002	Kerumahtanggaan	55.327.000	46.750.930	12	12	1,00	1,00	8.576.070
17	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.594.266.000	1.484.874.366	12	12	1,00	1,00	109.391.634
18	EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	129.004.000	120.687.000	17	17	1,00	1,00	8.317.000

No	Kode RO	Nomenklatur RO	Anggaran		Rincian Output		CRO	Nilai Maksimal CRO	Efisiensi (CROxPagu) - Realisasi)
			Pagu Akhir	Realisasi SP2D	Target	Realisasi			
19	BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	3.824.000	2.505.000	25	50	2,00	1,20	2.083.800
20	BMB.002	Kehumasan	10.576.000	5.932.500	2	4	2,00	1,20	6.758.700
21	BMB.003	Pameran/Eksibisi	7.400.000	7.089.000	1	3	3,00	1,20	1.791.000
22	EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	9.924.000	7.135.000	5	7	1,40	1,20	4.773.800
			2.174.612.000	1.981.966.458			50,79	25,60	269.728.542
Efisiensi									12,40%

Dengan menggunakan metode perhitungan sesuai sesuai PMK N0.22/PMK.02/2021 dan ND-6/MK.1/2021 diperoleh nilai efisiensi KPKNL Tasikmalaya sebesar 12,40%. Sebagaimana data pada tabel di atas, efisiensi pada KPKNL Tasikmalaya diperoleh dari efisiensi penggunaan anggaran dan/atau optimalisasi capaian output yang melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA terutama pada beberapa output non generik.

Selama tahun 2023 yang merupakan masa awal Pencabutan PSBB dan PPKM, KPKNL Tasikmalaya mengoptimalkan tatap muka dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Hal tersebut terbukti dapat menekan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian output pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendorong timbulnya efisiensi pelaksanaan anggaran.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

KPKNL Tasikmalaya memiliki beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan pemohon lelang untuk setiap lelang yang akan diajukan Edukasi kepada pemohon lelang supaya memasarkan obyek lelang dengan maksimal
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan pemohon lelang untuk setiap lelang yang akan diajukan Edukasi kepada pemohon lelang supaya memasarkan obyek lelang dengan maksimal

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
1c-CP	Indeks Integritas	Sosialisasi webinar anti korupsi oleh kepala kantor dan publikasi pada media sosial
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Mengevaluasi setiap layanan dan membina hubungan baik dengan segenap stakeholder
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBSK
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan data pendukung, dan menginput data pada SIMAN Portofolio
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	
4a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	Edukasi kepada pemohon lelang
4b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	Edukasi kepada pemohon lelang
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Analisis atas permohonan dan kegunaan hasil penilaian yang dilakukan dengan baik

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	program/kegiatan pembuatan basis data penilaian property yang dapat digunakan sebagai rujukan pembanding utamanya yaitu penilaian yang mempergunakan data pasar dalam perhitungannya.
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Adanya Aplikasi Rebana Reksa Bandha Nagara (Menjaga Aset Negara) KPKNL Tasikmalaya. Dengan adanya aplikasi tersebut hasil kinerja dan pengambilan keputusan pun dapat dilakukan dengan baik dan mudah berdasarkan data yang ada.
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Dilakukan monitoring capaian kinerja setiap bulan
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	- Monitoring Rencana Penarikan Dana - Monitoring Realisasi Anggaran - Monitoring Capaian Output - Simulasi Pehitungan Nilai IKPA dan Smart DJA
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan - Workshop dan sosialisasi yang diadakan secara berkala oleh Kantor Pusat
9	Organisasi yang Fit For Purpose	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	
10a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	

7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Risiko yang akan dimitigasi besera tindak lanjut penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk risiko satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah koordinasi dengan satuan kerja terkait tindak lanjut persetujuan yang telah diterbitkan pada satuan kerja;

- b. Untuk risiko satuan kerja tidak menyampaikan laporan wasdal tepat waktu, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah menyampaikan imbauan penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian dan koordinasi berkelanjutan dengan satuan kerja terkait penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian;
- c. KPKNL Tasikmalaya melalui Seksi PKN pun memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang optimal dalam kinerja pengelolaan BMN seperti peraih PNBPN tertinggi dan hal tersebut akan dilanjutkan dan dikembangkan.
- d. Unit Pelayanan Penilaian pada Tahun 2023 telah menyusun rencana aksi tahunan dan triwulanan berdasarkan situasi kondisi dan capaian kinerja tiap triwulan, hasilnya rencana aksi yang telah disusun dan dilaksanakan berhasil mencapai target kinerja. Hasil ini merupakan hasil kerjasama antar Pegawai Unit Pelayanan Penilaian, Unit Teknis dan Pendukung KPKNL Tasikmalaya, Kanwil DJKN Jawa Barat maupun stakeholder Unit Pelayanan Lelang di wilayah;
- e. Untuk risiko banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih, Seksi Piutang Negara telah melakukan penagihan Piutang Negara dan menyelesaikan BKPN dengan 4 cara yaitu pelunasan, PSBDT, pengembalian, atau penarikan.

8. Rencana Aksi Ke Depan Tahun 2024

Rencana aksi KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Rencana Aksi Ke Depan
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk tindak lanjut persetujuan yang sudah diterbitkan
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang
1c-CP	Indeks Integritas	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Mengevaluasi setiap layanan dan membina hubungan baik dengan segenap stakeholder
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBSK

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Rencana Aksi Ke Depan
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan data pendukung, dan menginput data pada SIMAN Portofolio
4	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	
4a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	Edukasi kepada pemohon lelang
4b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	Edukasi kepada pemohon lelang
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Menjaga nilai deviasi berada pada safety net nya
5b-CP	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Untuk dapat menangani frekuensi permohonan penilaian yang banyak, maka penugasan secara penunjukkan penilai (secara individu) akan menjadi opsi yang terbaik
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
7a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Dilakukan monitoring capaian kinerja setiap bulan
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Rencana Penarikan Dana - Monitoring Realisasi Anggaran - Monitoring Capaian Output- koorinasi antar pic rincian output - Simulasi Pehitungan Nilai IKPA dan Smart DJA

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Rencana Aksi Ke Depan
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan - Workshop dan sosialisasi yang diadakan secara berkala oleh Kantor Pusat
9	Organisasi yang Fit For Purpose	
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	
10a-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPKNL Tasikmalaya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

1. Penyerapan Anggaran

Pagu DIPA KPKNL Tasikmalaya tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.174.612.000, dengan rincian belanja barang sebesar Rp2.035.008.000 dan belanja modal sebesar Rp139.604.000. Realisasi belanja s.d. Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan berbasis akrual (transaksi di SAKTI):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.035.008.000	1.850.879.458	90,95%
2	Belanja Modal	139.604.000	131.087.000	93,90%
Total		2.174.612.000	1.981.966.458	91,14%

2. Realisasi Penyerapan berbasis Kas (transaksi yang sudah SP2D di OMSPAN):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.035.008.000	1.850.879.458	90,95%
2	Belanja Modal	139.604.000	131.087.000	93,90%
Total		2.174.612.000	1.981.966.458	91,14%

3. Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Tasikmalaya sebagai berikut:

Capaian IKI Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Capaian IKI Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. bulan Desember 2023 adalah sebesar 108,58 dari target 100 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Indikator IKI	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			99,57
1. Revisi DIPA	100	10	10
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	10
3. Penyerapan Anggaran	100	20	20
4. Belanja Kontraktual	95,71	10	9,57
5. Penyelesaian Tagihan	100	10	10
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
7. Dispensasi SPM	100	5	5
8. Capaian Output	100	25	25
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			93,57
1. Capaian Rincian Output	100	43,5	43,5
2. Efisiensi	81,01	28,60	23,17
3. Konsistensi Penyerapan Anggaran	99,26	18,20	18,07
4. Penyerapan Anggaran	91,14	9,7	8,84
Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Desember 2023			96.57
Target IKI IKKPA			100,00
Realisasi IKI IKKPA s.d. Desember 2023			108,58
Indeks Capaian Kinerja IKI IKKPA s.d. Desember 2023			108,58%

4. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 :

Jenis Pendapatan	Besaran
PNBP Aset	Rp3.243.336.350,00
Biad PPN	Rp15.075.402,00
PNBP berupa bea lelang	Rp2.792.066.204,00
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp.6.050.477.956,00

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Tasikmalaya secara umum pada Tahun Anggaran 2023 adalah sangat baik. KPKNL Tasikmalaya telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut dengan inovasi-inovasi yang di buat. Perencanaan dan strategi-strategi dibahas pimpinan dengan seluruh pegawai maupun dengan stakeholder untuk baik dengan Dialog Kinerja Organisasi maupun dengan *Focus Grup Discussion*, sosialisasi baik melalui daring maupun luring dikantor maupun langsung kepada masyarakat. Hasilnya hampir seluruh target yang telah ditetapkan berdasar indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2023 tercapai sebesar 112,12%.

Keseluruhan target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah mencapai realisasi sesuai atau bahkan melampaui target dan beberapa penghargaan yang didapat juga merupakan dedikasi yang tinggi dari pegawai KPKNL Tasikmalaya. Pada Tahun 2019 dan 2022 KPKNL Tasikmalaya telah meraih predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM hal ini dibangun bersama baik internal pegawai KPKNL Tasikmalaya dengan seluruh stakeholder pada KPKNL Tasikmalaya serta arahan dan bimbingan dari Kantor Pusat DJKN maupun dari Kanwil DJKN Jawa Barat.

Dengan tetap menjaga nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta menjalankan motto KPKNL Tasikmalaya yaitu "PASTI", Profesional, Amanah, Santun, Transparan, Inovatif kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatkan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Tasikmalaya berkomitmen menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja dengan integritas dan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada stakeholder KPKNL Tasikmalaya.

LAMPIRAN

DJKN

Penghargaan IKPA TA 2022

KPKNL Tasikmalaya meraih penghargaan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (Nilai 100), Selasa (21/03/2023)

#JAGAASETNEGARA 150 991

DWI WARNA TREASURY AWARD
Nomor: KEP-75/WPB.13/2023

Diberikan kepada:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya (525343)

Sebagai
SATKER DENGAN CAPAIAN NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMPURNA (NILAI 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester II Tahun 2022

Bandung, 21 Maret 2023

Heru Rudy Nugroho
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN
LINGKUP KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
SEMESTER II TAHUN 2022

#JAGAASETNEGARA 150 991



